

---

## Analisis Kegiatan Pencatatan Prevalensi Narkoba menggunakan Metode POAC

Probo Putro Aji Pangestu<sup>1</sup>, Erwing Wahyu Millensyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> UPN “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 23041010237@student.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>, erwing.wahyu.fisip@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>

---

### Article History:

Received: 28 Februari 2026

Revised: 10 Maret 2026

Accepted: 23 Maret 2026

**Keywords:** POAC, Prevalensi Narkoba, Manajemen, BNNK Sidoarjo, BPS

**Abstract:** Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana proses pencatatan prevalensi penggunaan narkoba di Kabupaten Sidoarjo dikelola dari sudut pandang fungsi manajemen, khususnya melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara sebagai data pendukung, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak utama yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Teknik analisis data Analisis data kualitatif merujuk pada kerangka Creswell, yang mencakup tahapan pengorganisasian data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dipastikan melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pada tahap perencanaan, kegiatan pencatatan prevalensi telah disusun berdasarkan kebutuhan data dan tujuan program, meskipun masih menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya. Pada tahap pengorganisasian, pembagian peran antara BNNK Sidoarjo dan BPS Kabupaten Sidoarjo telah berjalan secara jelas dan terkoordinasi. Tahap pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun terdapat kendala teknis di lapangan. Pada tahap pengawasan, evaluasi kegiatan telah dilakukan, tetapi masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan di masa mendatang.

---

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial yang hingga kini masih menjadi tantangan signifikan bagi pemerintah maupun masyarakat. Narkoba—yang meliputi narkotika, psikotropika, serta berbagai zat adiktif lainnya—berpotensi menimbulkan dampak merugikan secara luas, baik pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Dampak penggunaan narkoba tidak terbatas pada individu pengguna, tetapi juga memengaruhi lingkungan sosial serta stabilitas kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan komponen penting dalam kebijakan publik di Indonesia. (Badan Narkotika Nasional [BNN], 2021).

---

Dalam konteks penanggulangan narkoba, pemerintah memerlukan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memahami tingkat dan pola penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan adalah prevalensi penggunaan narkoba, yaitu persentase penduduk yang pernah atau masih menggunakan narkoba dalam periode waktu tertentu. Data prevalensi digunakan untuk menggambarkan sejauh mana penyalahgunaan narkoba terjadi, kelompok masyarakat yang rentan, serta kecenderungan penggunaan narkoba di suatu wilayah. Dengan adanya data prevalensi, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik dalam aspek pencegahan, pemberantasan, maupun rehabilitasi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa survei prevalensi banyak digunakan untuk menggambarkan kondisi penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Rotinsulu, Langi, dan Joseph (2018) berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 ditemukan bahwa sekitar 2,5% remaja di Indonesia pernah menggunakan narkoba, dengan faktor usia, jenis kelamin, dan wilayah tempat tinggal sebagai determinan yang berpengaruh. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayati (2024) menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan narkoba pada remaja perkotaan di wilayah Jawa dan Bali mencapai 4,68%, yang dipengaruhi oleh faktor demografis dan lingkungan sosial.

Selain itu, penelitian Herman, Wibowo, dan Rahman (2024) di tingkat lokal menunjukkan adanya perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar sekolah menengah atas, yang menggambarkan bahwa permasalahan narkoba juga terjadi pada kelompok usia produktif. Sementara itu, penelitian Oktavian dan Elon (2023) menegaskan bahwa tren prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih memerlukan perhatian serius melalui penguatan sistem pendataan dan peningkatan kualitas informasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa data prevalensi memiliki peran penting dalam mendukung perumusan kebijakan penanggulangan narkoba.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala melaksanakan Survei Prevalensi Penggunaan Narkoba. Survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia, termasuk di tingkat daerah. Pelaksanaan survei prevalensi ini menjadi penting karena tanpa data yang valid, kebijakan penanggulangan narkoba berisiko disusun berdasarkan asumsi atau perkiraan semata, sehingga efektivitas kebijakan tersebut sulit diukur.

Namun demikian, survei prevalensi narkoba bukan hanya persoalan pengumpulan data semata, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana kegiatan tersebut direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan diawasi. Survei ini melibatkan banyak pihak, sumber daya manusia, metode pengumpulan data yang sensitif, serta koordinasi antarinstansi, sehingga diperlukan sistem manajemen yang baik agar hasil survei benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Tanpa pengelolaan yang tepat, survei prevalensi berpotensi menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu, kurangnya sumber daya, resistensi responden, hingga risiko ketidakakuratan data.

Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba ditinjau dari perspektif manajerial. Salah satu kerangka yang dapat digunakan ialah teori manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) yang dikemukakan oleh George R. Terry. Pendekatan POAC menegaskan bahwa keberhasilan suatu kegiatan atau program sangat dipengaruhi oleh mutu perencanaan, kejelasan struktur pengorganisasian, efektivitas pelaksanaan, serta pengawasan yang berkesinambungan (Terry, 1977). Dengan menerapkan kerangka POAC, pelaksanaan survei prevalensi narkoba dapat dikaji secara sistematis untuk menilai sejauh mana setiap fungsi manajemen tersebut telah diimplementasikan.

---

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan oleh BNNK Sidoarjo dengan dukungan teknis dari BPS Kabupaten Sidoarjo. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan POAC untuk mengidentifikasi bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan survei prevalensi tersebut, serta untuk mengetahui berbagai kendala dan potensi perbaikan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan survei prevalensi narkoba, khususnya di tingkat daerah.

## LANDASAN TEORI

### 1. Manajemen dalam Administrasi Publik

Manajemen merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan administrasi publik, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Dalam sektor publik, manajemen tidak hanya dipahami sebagai upaya mencapai tujuan organisasi, tetapi juga sebagai proses pengelolaan sumber daya yang harus berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kepentingan publik. Setiap kebijakan dan program pemerintah menuntut adanya pengelolaan yang sistematis agar tujuan yang telah dirumuskan dapat direalisasikan secara optimal melalui pelaksanaan yang efektif serta pemanfaatan sumber daya yang efisien. (Akbar & Tjenreng, 2025).

Administrasi publik pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur, mengoordinasikan, dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat keberhasilan suatu program pemerintah sangat ditentukan oleh mutu serta kualitas pelaksanaan manajemennya. Tanpa manajemen yang baik, pelaksanaan program berpotensi mengalami berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran, pemborosan sumber daya, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi (Denhardt dan Denhardt, 2015).

Secara lebih luas, administrasi publik juga mempelajari bagaimana pemerintahan mengelola organisasi publik, menjalani program pembangunan, serta menjalin hubungan dengan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Ilmu administrasi publik ini membantu dalam memahami bagaimana pembuatan keputusan pemerintah diambil, bagaimana kebijakan dijalankan, serta bagaimana hasilnya dievaluasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sipil (Marliani, 2018).

### 2. Fungsi Administrasi Publik Dalam Teori POAC

Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC) merupakan rangkaian fungsi manajemen yang diperkenalkan oleh George R. Terry. Menurut Terry (1977), manajemen dipahami sebagai suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kerangka POAC digunakan dalam penelitian ini karena mampu menyajikan uraian yang sistematis mengenai pengelolaan kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengawasan.

Salah satu kerangka manajemen yang luas diterapkan dalam analisis organisasi maupun aktivitas pemerintahan ialah teori POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) yang dikemukakan oleh George R. Terry. Terry (1977) memaknai manajemen sebagai suatu proses yang bersifat khas, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan, yang dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif.

**Planning (Perencanaan)** merupakan tahap awal dalam proses manajemen yang menitikberatkan pada perumusan tujuan serta penyusunan langkah-langkah strategis guna

---

mencapai tujuan tersebut menjadi fondasi utama karena menentukan arah dan ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam konteks program pemerintah, perencanaan berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

**Organizing (Pengorganisasian)** merupakan proses penataan struktur kerja, pembagian tugas, serta penentuan hubungan kerja antarindividu atau antarunit organisasi. Melalui pengorganisasian yang jelas, setiap pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga potensi tumpang tindih pekerjaan dapat diminimalkan.

**Actuating (Pelaksanaan)** Merupakan proses mengaktifkan dan mengarahkan seluruh sumber daya yang telah direncanakan serta diorganisasikan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup kegiatan pemberian arahan, koordinasi, serta komunikasi yang efektif antar pelaksana. Keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan dan pelaksana dalam menerjemahkan rencana ke dalam tindakan nyata.

**Controlling (Pengawasan)** merupakan salah satu fungsi manajerial yang diarahkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara konsisten dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Proses pengawasan mencakup kegiatan pemantauan dan evaluasi secara sistematis, serta penerapan langkah korektif guna mengatasi setiap bentuk penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Fungsi ini penting untuk menjaga kualitas hasil kegiatan serta sebagai dasar perbaikan pada pelaksanaan selanjutnya.

Keempat fungsi POAC tersebut merupakan satu kesatuan proses yang saling berkaitan. Kelemahan pada salah satu fungsi dapat memengaruhi efektivitas keseluruhan kegiatan, sehingga penerapan POAC secara utuh menjadi syarat penting dalam keberhasilan manajemen suatu program.

### **3. Relevansi Teori POAC dalam Kegiatan Pemerintahan**

Teori POAC relevan digunakan dalam analisis kegiatan pemerintahan karena mampu memberikan kerangka yang sistematis dalam menilai proses pengelolaan suatu program atau kegiatan. Pemerintah sebagai organisasi publik dituntut untuk menjalankan setiap kegiatan secara terencana, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam kegiatan survei dan pendataan, penerapan fungsi-fungsi POAC menjadi sangat penting karena kegiatan tersebut bersifat teknis, melibatkan banyak pihak, serta memiliki risiko kesalahan yang cukup tinggi. Fungsi perencanaan menentukan kejelasan metode dan sasaran kegiatan, fungsi pengorganisasian mengatur pembagian peran antarinstansi dan pelaksana, fungsi pelaksanaan memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur, sedangkan fungsi pengawasan berperan dalam menjaga kualitas dan validitas data yang dihasilkan (Sutarto, 2016).

Dengan demikian, teori POAC tidak hanya diposisikan sebagai kerangka konseptual dalam manajemen, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen analitis yang relevan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan survei prevalensi penggunaan narkoba.

### **4. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Berdasarkan teori POAC yang dikemukakan oleh George R. Terry, penelitian ini menggunakan empat fungsi manajemen planning, organizing, actuating, dan controlling sebagai kerangka analisis dalam mengkaji pelaksanaan kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba. Masing-masing fungsi manajemen dianalisis untuk menelaah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh BNNK Sidoarjo dengan dukungan teknis dari BPS Kabupaten Sidoarjo. Kerangka analisis ini digunakan sebagai dasar dalam menginterpretasikan temuan penelitian pada bab hasil dan pembahasan guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pengelolaan survei prevalensi narkoba, sekaligus mengidentifikasi kendala serta peluang

.....

perbaikan dalam pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses pengelolaan kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba, bukan pada pengujian hipotesis atau hubungan antarvariabel secara statistik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan berlangsung dalam konteks nyata. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell (2014) dan Sugiyono (2020) yang menekankan pentingnya analisis proses, konteks, serta dinamika sosial dalam penelitian kualitatif.

Penelitian dilaksanakan di BNNK Sidoarjo dengan melibatkan BPS Kabupaten Sidoarjo sebagai mitra teknis dalam kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran strategis kedua instansi tersebut dalam penyelenggaraan survei prevalensi narkoba di tingkat daerah. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pelaksanaan kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba menggunakan pendekatan POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) untuk mengkaji penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan tersebut.

Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme pengawasan di lapangan. Wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat dan memperjelas temuan observasi, dengan teknik semi-terstruktur kepada pihak-pihak yang terlibat. Dokumentasi meliputi pedoman survei, laporan kegiatan, surat tugas, dan dokumen pendukung lainnya yang berfungsi sebagai bukti tertulis untuk memperkuat hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil**

Dalam kegiatan Pencatatan Prevalensi Penggunaan Narkoba di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kegiatan ini dijalankan melalui pendekatan manajerial yang sistematis. Dengan metode analisis POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) penulis bisa menggambarkan bagaimana survei dirancang, dikoordinasikan, dilaksanakan, dan diawasi sehingga mampu menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### ***Planning (Perencanaan)***

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba di Kabupaten Sidoarjo diawali dengan tahap perencanaan yang mengacu pada pedoman pelaksanaan survei prevalensi dari Badan Narkotika Nasional. Pada tahap ini, BNNK Sidoarjo melakukan koordinasi awal dengan BPS Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan meliputi penetapan tujuan kegiatan, yaitu memperoleh data prevalensi penggunaan narkoba yang dapat menggambarkan kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, perencanaan juga mencakup penentuan sasaran survei, metode pengumpulan data, serta jadwal pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan dokumentasi yang ada, penentuan jumlah responden dan wilayah pelaksanaan survei disesuaikan dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.

Dalam tahap perencanaan ini, BNNK Sidoarjo dan BPS Kabupaten Sidoarjo juga mempersiapkan instrumen pengumpulan data serta kebutuhan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan survei. Hasil observasi menunjukkan bahwa perencanaan waktu

---

pelaksanaan relatif terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara efektif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

#### ***Organizing (Pengorganisasian)***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba dilakukan oleh BNNK Sidoarjo bekerja sama dengan BPS Kabupaten Sidoarjo melalui pembagian peran dan tanggung jawab antara BNNK Sidoarjo dan BPS Kabupaten Sidoarjo. BNNK Sidoarjo berperan sebagai penanggung jawab kegiatan di tingkat daerah, sementara BPS Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai mitra teknis, khususnya dalam aspek metodologi survei dan pengolahan data.

Pembagian tugas tersebut dituangkan dalam struktur pelaksana kegiatan yang melibatkan koordinator kegiatan, petugas lapangan, serta tim pengolah data. Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, pembagian tugas ini disertai dengan surat tugas dan pedoman pelaksanaan kegiatan sebagai acuan bagi masing-masing pelaksana.

Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap pelaksana memiliki peran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam implementasinya di lapangan, masih diperlukan penyesuaian koordinasi, terutama dalam menyamakan pemahaman teknis antar petugas yang terlibat.

#### ***Actuating (Pelaksanaan)***

Dalam pelaksanaan di BNNK Sidoarjo pelaksanaan kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba secara umum telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pembagian tugas yang ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi, petugas lapangan melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan instrumen survei yang telah disiapkan sebelumnya.

Proses pelaksanaan melibatkan interaksi langsung antara petugas lapangan dan responden. Dalam pelaksanaannya, petugas tetap memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk menjaga kerahasiaan identitas responden. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan survei menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan dan tingkat keterbukaan responden yang bervariasi, mengingat topik narkoba merupakan isu yang sensitif.

Meskipun terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan, kegiatan survei tetap dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan survei dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi antara BNNK Sidoarjo dan BPS Kabupaten Sidoarjo.

#### ***Controlling (Pengawasan)***

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dalam kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengecekan data yang telah dikumpulkan. Pengawasan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk sebagai koordinator kegiatan guna memastikan bahwa proses pengumpulan data berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Dokumentasi menunjukkan adanya proses pengecekan terhadap data hasil survei untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan atau ketidaksesuaian data. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan selama kegiatan berlangsung, meskipun intensitas pengawasan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Secara umum, pengawasan dilakukan untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan prevalensi penggunaan narkoba di Kabupaten Sidoarjo.

Analisis POAC memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tahapan-tahapan utama dalam proses manajemen. Melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang terstruktur, proses pengelolaan kegiatan dapat dianalisis secara sistematis dan terarah.

---

Organisasi dapat menjalankan operasionalnya secara terarah, efisien, dan berkelanjutan. Keempat elemen ini saling berkaitan dan menjadi tonggak utama dalam pencapaian tujuan organisasi.

## **2. Pembahasan**

POAC merupakan kerangka dasar manajemen yang digunakan untuk memastikan bahwa sesuatu organisasi dapat menjalankan proses kerjanya secara efektif, efisien, dan terarah, setiap elemen dalam POAC memiliki peran yang saling berkaitan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Berikut adalah penjelasannya.

### ***Planning (Perencanaan)***

Berdasarkan temuan hasil penelitian, tahap perencanaan dalam kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional serta melalui koordinasi dengan BPS Kabupaten Sidoarjo. Dalam perspektif teori manajemen POAC, perencanaan merupakan fungsi awal yang berperan penting dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu kegiatan (Terry, 1977).

Perencanaan yang mencakup penetapan tujuan, sasaran survei, metode pengumpulan data, dan jadwal pelaksanaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba telah memiliki arah pelaksanaan yang jelas, sejalan dengan pandangan Terry (1977) yang menyatakan bahwa perencanaan menjadi dasar bagi seluruh aktivitas organisasi. Namun, keterbatasan waktu pelaksanaan yang ditemukan pada tahap hasil menunjukkan bahwa perencanaan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi fleksibilitas pelaksanaan survei, khususnya ketika menghadapi kendala yang tidak terduga.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Rotinsulu, Langi, dan Joseph (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan survei prevalensi berperan penting dalam menghasilkan data yang valid dan relevan sebagai dasar kebijakan. Penelitian tersebut menekankan bahwa kejelasan tujuan dan kesiapan teknis menjadi faktor penting dalam perencanaan survei prevalensi narkoba. Selain itu, laporan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI, 2015) juga mengungkapkan bahwa kelemahan dalam tahap perencanaan dapat berdampak langsung pada kualitas data prevalensi yang dihasilkan.

Hasil survei nasional di Indonesia menunjukkan bahwa perencanaan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba disusun sebagai kegiatan survei periodik yang dilengkapi dengan kejelasan definisi operasional, rancangan sampling, serta teknik pengumpulan data yang dijaga konsistensinya pada setiap periode pelaksanaan (BNN, BRIN, & BPS, 2022). Selain itu, adanya koordinasi lintas lembaga antara Badan Narkotika Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Badan Pusat Statistik mengindikasikan perlunya evaluasi dan penyesuaian teknis secara berkelanjutan terhadap metodologi survei guna memastikan validitas dan keterbandingan data yang dihasilkan (BNN, 2025). Kondisi tersebut menegaskan bahwa kesiapan teknis merupakan aspek krusial dalam tahap perencanaan survei prevalensi, terutama untuk mendukung penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika karakteristik populasi sasaran.

Dengan demikian, meskipun perencanaan telah disusun secara sistematis, masih diperlukan penyesuaian dalam aspek pengelolaan waktu agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

### ***Organizing (Pengorganisasian)***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba dilakukan melalui pembagian peran yang jelas antara BNNK Sidoarjo dan BPS Kabupaten Sidoarjo. Dalam kerangka teori POAC, pengorganisasian berfungsi mengatur struktur kerja dan pembagian tugas guna memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab setiap pelaksana kegiatan (Terry, 1977).

---

Pembagian tugas dalam struktur pelaksana dan surat tugas pada kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba mencerminkan adanya pengorganisasian yang formal dan terencana, sejalan dengan pendapat Sutarto (2016) mengenai pentingnya kejelasan struktur organisasi sebagai prasyarat koordinasi kerja yang efektif. Namun, temuan adanya kebutuhan penyesuaian koordinasi di lapangan mengindikasikan bahwa pengorganisasian tidak hanya berhenti pada pembagian tugas, tetapi juga memerlukan komunikasi dan pemahaman teknis yang berkelanjutan antar pelaksana.

Dalam konteks nasional, dokumen strategi BPS periode 2020–2024 menegaskan bahwa peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik menjadi arah kebijakan strategis untuk memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN), termasuk kolaborasi pelaksanaan survei yang melibatkan banyak pihak untuk menghasilkan data berkualitas (BPS, 2020–2024). Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengorganisasian kegiatan statistik bukan hanya tentang struktur internal, tetapi juga hubungan fungsional antar lembaga demi efisiensi operasional dan kehandalan data. Selain itu, penandatanganan perjanjian kerja sama antara Puslitdatin BNN dan BPS pada 2025 mencerminkan model koordinasi formal yang intensif dalam pengukuran prevalensi di tingkat nasional, di mana perjanjian tersebut dirancang untuk mengoptimalkan pendekatan pengumpulan data dan meningkatkan akurasi hasil survei (BNN, 2025).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Herman, Wibowo, dan Rahman (2024) yang menegaskan bahwa koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antar pihak pelaksana menjadifaktor penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan yang berkaitan dengan pendataan dan penanggulangan narkoba. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pengorganisasian kegiatan pencatatan prevalensi di Kabupaten Sidoarjo perlu terus ditingkatkan melalui penguatan koordinasi teknis antara BNNK dan BPS agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara lebih efisien dan terstruktur.

#### ***Actuating (Pelaksanaan)***

Tahap pelaksanaan kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba merupakan proses penggerakan seluruh sumber daya yang telah direncanakan dan diorganisasikan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan survei secara umum tetap berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, meskipun dihadapkan pada berbagai kendala operasional di lapangan, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan dan sensitivitas responden terhadap topik penyalahgunaan narkoba.

Dalam kerangka teori POAC, fungsi *actuating* menekankan pada kemampuan organisasi dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan memotivasi sumber daya manusia agar rencana kerja dapat diwujudkan secara efektif (Terry, 1977). Temuan bahwa petugas lapangan tetap menjalankan kegiatan sesuai prosedur menunjukkan adanya upaya pelaksanaan yang konsisten. Namun demikian, variasi tingkat keterbukaan responden mengindikasikan bahwa pelaksanaan survei prevalensi narkoba menuntut pendekatan yang adaptif serta kepekaan sosial yang tinggi terhadap karakteristik masyarakat setempat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayati (2024) yang menyatakan bahwa pelaksanaan survei prevalensi narkoba di Indonesia kerap menghadapi kendala pada tahap operasional, terutama terkait keterbatasan waktu pelaksanaan dan kesiapan responden dalam memberikan informasi. Selain itu, laporan Indonesia Drugs Report menunjukkan bahwa faktor non-teknis, seperti stigma sosial dan kekhawatiran responden, masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pengumpulan data narkoba di masyarakat, yang berpotensi memengaruhi kelengkapan dan akurasi data (BNN, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan fungsi *actuating* tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga oleh kapasitas pelaksana dalam menyesuaikan strategi pelaksanaan dengan dinamika sosial di lapangan.

---

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan fungsi *actuating* dalam kerangka POAC. Namun, masih diperlukan penguatan kapasitas petugas lapangan, khususnya dalam aspek komunikasi persuasif dan manajemen waktu, agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung lebih efektif dalam menghadapi kompleksitas kondisi lapangan.

### **Controlling (Pengawasan)**

Fungsi pengawasan dalam manajemen berperan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba berjalan sesuai dengan rencana, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung selama pelaksanaan kegiatan serta pengecekan terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh petugas lapangan. Bentuk pengawasan ini mengindikasikan adanya upaya pengendalian untuk menjaga kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan tujuan yang telah direncanakan.

Dalam kerangka teori POAC, Terry (1977) menegaskan bahwa pengawasan berfungsi sebagai mekanisme evaluasi untuk mendeteksi penyimpangan dan menjadi dasar pengambilan tindakan korektif. Temuan bahwa pengawasan dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pengendalian kualitas data. Namun demikian, keterbatasan sumber daya yang memengaruhi intensitas pengawasan mengindikasikan bahwa fungsi *controlling* belum dilaksanakan secara optimal, khususnya dalam aspek evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Oktavian dan Elon (2023) yang menegaskan bahwa pengawasan dan evaluasi merupakan faktor kunci dalam menjamin kualitas data prevalensi narkoba, terutama dalam konteks kegiatan survei lapangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak disertai dengan mekanisme evaluasi yang terstruktur berpotensi menurunkan tingkat akurasi dan konsistensi data yang dihasilkan. Selain itu, laporan Indonesia Drugs Report juga menekankan bahwa kualitas data prevalensi sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian mutu pada tahap pengumpulan dan pengolahan data, termasuk konsistensi pemeriksaan dan validasi data lapangan (BNN, 2022).

Dengan demikian, pengawasan dalam kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi *controlling* dalam kerangka POAC. Namun, pengawasan tersebut masih perlu diperkuat melalui pengembangan mekanisme evaluasi yang lebih sistematis dan peningkatan kapasitas pengendalian kualitas data agar hasil survei yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pencatatan prevalensi penggunaan narkoba di Kabupaten Sidoarjo pada prinsipnya telah menerapkan fungsi manajemen POAC, meskipun masih terdapat aspek-aspek tertentu yang memerlukan penguatan. Pada tahap *planning*, perencanaan kegiatan telah disusun berdasarkan tujuan pengumpulan data prevalensi dan kebutuhan program pencegahan narkoba, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam aspek waktu dan kesiapan teknis. Pada tahap *organizing*, pembagian tugas dan tanggung jawab antara BNNK Sidoarjo dan BPS Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan secara jelas dan terstruktur. Pada tahap *actuating*, kegiatan pencatatan prevalensi pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala teknis di lapangan. Pada tahap *controlling*, pengawasan dan evaluasi kegiatan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan.

---

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan, BNNK Sidoarjo dan BPS Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan perencanaan waktu dan teknis yang lebih matang agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif.
2. Pada tahap pengorganisasian, koordinasi antarinstansi perlu terus diperkuat agar pembagian peran dapat berjalan lebih optimal.
3. Pada tahap pelaksanaan, diperlukan peningkatan kesiapan teknis dan sumber daya untuk meminimalkan kendala di lapangan.
4. Pada tahap pengawasan, perlu dilakukan evaluasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pencatatan prevalensi narkoba di masa mendatang.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Akbar, M. S. A., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran manajemen pelayanan publik dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 305–312.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2021). *Survei nasional penyalahgunaan narkoba 2021* (Vol. 2, No. 3). Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, & Badan Pusat Statistik. (2022). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021* (Dokumen PDF). BNN–BRIN–BPS.
- Badan Narkotika Nasional. (2025). BNN–BRIN–BPS paparkan perkembangan penelitian prevalensi narkoba 2025. *BNN RI* (Publikasi berita).
- Badan Pusat Statistik. (2020–2024). *Rencana Strategis BPS Tahun 2020–2024*. BPS RI.
- Badan Narkotika Nasional. (2025). *Puslitdatin BNN sepakati perjanjian kerja sama dengan BPS dalam rangka pengukuran prevalensi*. BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2022). *Indonesia drugs report 2022*. Jakarta: BNN RI.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). New York, NY: Routledge.
- Hidayati, F. N. F. (2024). Faktor risiko penggunaan NAPZA di kalangan remaja perkotaan Jawa–Bali Indonesia: Temuan studi lintas nasional. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4). doi:10.31004/jkt.v5i4.37126
- Herman, A., Wibowo, A., & Rahman, N. (2024). Perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banawa, Kabupaten Donggala. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*. doi:10.56338/mppki.v2i1.524
- Marliani, L. (2018). Definisi administrasi dalam berbagai sudut pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 18–19. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>
- Oktavian, J. A., & Elon, Y. (2023). Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap narkoba dan tren prevalensi penyalahgunaan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 4(2), 950.
- Rotinsulu, V. N., Langi, F. L. F. G., & Joseph, W. B. S. (2018). Prevalensi dan determinan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja Indonesia: Analisis
-

- data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012. *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(5).
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. (2016). *Dasar-dasar organisasi dan manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Terry, G. R. (1977). *Principles of management*. Homewood, IL: Richard D. Irwin.
-